

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik

1. Konsep partai Politik

Menurut Epstein (Gatara, 2009: 191), mengatakan bahwa partai politik adalah setiap kelompok-kelompok, meskipun terorganisasi secara sederhana, yang bertujuan mendapatkan jabatan publik dalam pemerintahan, dengan identitas tertentu.

Partai politik sangat berperan andil mengingat wakil-wakil masyarakat yang menduduki jabatan pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif merupakan anggota partai politik. Disebutkan oleh Epstein diatas tentang konsep defisini sebuah partai politik merupakan kelompok-kelompok yang secara sederhana memiliki fungsi struktural yang terorganisir yang mempunyai tujuan untuk merebut kekuasaan dalam jabatan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan partai politik nya masing-masing.

Berwujud kelompok dalam hal ini ialah tentu saja tiap kelompok menunjukkan identitas nya dengan membangun karakter yang kuat dan diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat, kemudian yang dikatakan bahwa terorganisir secara sederhana merupakan dalam organisasinya tiap

anggota jelas melakukan hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan mandat yang sudah ditetapkan agar tercapainya tujuan-tujuan partai dan konsep akan partai politik yang selanjutnya ialah pengakuan masyarakat akan hak-hak pengorganisasian serta mengembangkan diri mereka, dan konsep yang terakhir yaitu dimana inti dari aktivitas partai politik ialah selaku penyeleksi kandidat dari kader partai itu sendiri tentunya untuk memperoleh jabatan pemerintahan atau jabatan publik.

Menurut UU Republik Indonesia No. 2 tahun 2008 tentang partai politik, partai politik adalah organisasi politik yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembentukan partai politik menurut konstitusi yang telah ada, yakni UU No 2 tahun 2008 menjelaskan adanya persamaan beberapa orang maupun beberapa kelompok yang dengan rasa sukarela membentuk suatu wadah yang dinamakan partai politik dengan tujuan dan fungsi dan ideologi yang jelas yang berkaitan erat pada karakteristik bangsa Indonesia.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa konsep partai politik adalah suatu wadah yang terdiri dari beberapa orang maupun kelompok yang memiliki tujuan untuk memperebutkan kekuasaan di sektor pemerintahan.

2. Fungsi dan Peran Partai Politik

Gaffar dan Amal (Efriza, 2012: 226) mengemukakan bahwa parpol mempunyai peranan yaitu 1) pendidikan politik 2) sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara 3) sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, dan 4) sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

Proses pendidikan politik merupakan upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam membentuk dan menghimbau masyarakat untuk mengerti dinamika politik yang terjadi dan memberikan respon melalui tindakan-tindakan yang sesuai sehingga terjadilah demokrasi sejati dimana tiap masyarakat benar-benar menggunakan hak pilihnya secara rasional tanpa adanya doktrin maupun pengaruh dari orang lain maupun kelompok kepentingan.

Selanjutnya, di dalam prosesnya partai politik juga memiliki peran dalam perekrutan kader-kader partai maupun calon yang akan diusungkan, dalam proses pengkaderan tiap partai politik memiliki cara yang berbeda-beda, dan biasanya dalam perekrutan partai akan mencari kader yang memiliki ideologi yang sama terhadap partainya guna tercapai tujuan partai tersebut. Karena kader partai tersebut akan menduduki sektor pemerintahan maupun sektor politik itu sendiri.

Salah satu peran dari partai adalah sebagai lembaga yang menghubungkan antara pemerintahan dengan masyarakat yang diharapkan dapat dijadikan alat penghubung, partai politik di berikan amanah untuk menampung aspirasi

rakyat dan diteruskan ke perwakilan pemerintah yang berwenang. Peran yang terakhir menurut Gaffar dan Amal ialah sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat, di poin yang terakhir ini peneliti menyimpulkan tidak jauh berbeda terhadap poin yang ketiga yaitu sebagai lembaga perwakilan aspirasi rakyat, namun disini lebih di khususkan kembali dengan hubungan ini langsung ke dari masyarakat ke tokoh pemerintahannya. Dengan adanya partai politik diharapkan dapat mendekatkan secara personal antara masyarakat dengan penguasa.

3. Tujuan Partai Politik

Secara garis besar tujuan dari partai politik yang satu dengan partai politik yang lainnya sama, yaitu untuk memperoleh dan merebut kekuasaan yang didalam konteks ini merupakan kekuasaan pemerintahan, seperti jabatan-jabatan baik di legislatif maupun eksekutif, namun secara khusus, partai politik juga memiliki tujuan yang berbeda yang bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang partai itu lakukan.

Kantaprawira (Efriza, 2012: 242) menjelaskan tujuan dari partai politik yaitu berpartisipasi dalam sektor pemerintahan, berusaha melakukan pengawasan, berperan untuk memadu tuntutan-tuntutan yang masih mentah.

Penjelasan dari berpartisipasi dalam sektor pemerintahan disini bisa dilihat dari partai politik yang berusaha memasukan orang-orangnya ke dalam sektor pemerintahan dan menjadi pejabat pemerintah sehingga partai dapat turut andil dalam menentukan keputusan politik yang akan dijadikan kebijakan di

pemerintahan. Berusaha melakukan pengawasan merupakan tujuan dari partai politik, partai politik dapat mengawasi tindakan pemerintah, kita kenal dengan istilah partai yang berkoalisi, partai politik yang berkoalisi akan ikut serta dan turut andil dalam pembuatan kebijakan, sedangkan partai politik yang tidak duduk di sektor pemerintahan dapat menjadi partai oposisi yang akan mengawasi kegiatan partai koalisi dalam penyelenggarannya. Berperan secara memadu, yaitu tentang tuntutan-tuntutan yang masih mentah, dalam arti masih belum di proses secara lebih lanjut dan mendetail dan tugas partai politik lah yang merancang isu-isu politik yang dapat dicerna dan diterima oleh masyarakat luas.

B. Pendidikan Politik Di Dalam Partai Politik

1. Definisi Pendidikan Politik

Surbakti (2011: 101) menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Proses dialogik ini kemudian diperjelas kembali oleh pendapat dari Kartono (2009: 65) tentang unsur-unsur pendidikan politik yang sejati meliputi: unsur pengenalan, unsur pemahaman, unsur berfikir secara kritis, unsur menentukan sikap, dan unsur merubah sikap.

Lebih lanjut, dapat dianalogikan bahwa timbal balik antara si pemberi pesan dan penerima pesan yang diolah kembali, melalui beberapa tahapan seperti adanya unsur pengenalan, pada fungsi partai politik, yaitu melakukan pendidikan politik ke masyarakat, partai politik melakukan pengenalan

terhadap visi misi, ideologi, program kerja partai maupun kader partai yang akan menjadi wakil partai pada pemilihan umum. Setelah melakukan pengenalan ialah pemahaman, dalam tahap ini, pada proses pendidikan politik yaitu dengan memberikan pemahaman yang berkaitan dengan persetujuan terhadap ideologi partai, pemahaman bagaimana calon-calon yang diusung oleh partai maupun para kader partai politik dapat melaksanakan segala hal yang akan dilakukan searah pada visi misi partai, pemahaman kader maupun calon yang akan diusung partai dalam menduduki jabatan pemerintahan tentang visi dan misi partai tentu saja sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dilakukan nantinya dapat seimbang dan berkesinambungan dengan partai politiknya.

partai politik hendaklah memberikan pemahama-pemahan yang benar dan didasari dengan transparansi berkaitan pada personal calon yang akan masyarakat pilih, tidak itu saja, partai politik yang paling penting dan utama dalam frase pemahan ialah bagaimana partai mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkhusus yang usia nya telah dinyatakan sebagai calon daftar pemilih agar mau turut andil dan ikut serta dalam melaksanakan proses pemilihan umum, pentingnya pemahaman akan berartinya suara mereka yang akan merubah nasib untuk beberapa dekade tentu saja dengan pengharapan dapat memunculkan masyarakat-masyarakat yang bersifat partisipan.

Implementasi pada proses pemahaman sudah berlangsung, berikutnya adalah berfikir secara kritis, pada tahap berfikir secara kritis ini lebih terkhusus

kearah fungsi pendidikan politik, partai politik hendaklah dapat mengajak masyarakat untuk peka dan berfikir secara kritis terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung, dengan masyarakat yang bisa diajak untuk berfikir kritis tentu saja besar kemungkinan akan munculah sosok pemimpin yang diharapkan dapat memajukan bangsa terkhusus wilayah daerah pilihannya dengan pikirannya yang realistis, kritis dan dinamis.

Proses terakhir yang merupakan unsur pendidikan politik sejati setelah berfikir kritis ialah melakukan perbuatan yang nyata, dalam konteks ini apabila dapat dikaitkan pada fungsi pendidikan partai politik dari segi internal partai ialah bagaimana kader dan calon partai yang diusungkan dapat mempraktekan apa yang sudah didapat dan dipelajari dalam proses pembelajaran yang dilakukan di partainya, dan dari segi fungsi partai politik yang memberikan pendidikan politik ke masyarakat atau yang bersifat eksternal ialah dengan membangkitkan rasa kepedulian yang tinggi akan pentingnya kehidupan politik yang terjadi, bagaimana partai dapat merubah pandangan masyarakat yang acuh terhadap pemilihan umum agar menjadi masyarakat yang sadar politik, yang diharapkan munculah pemilih-pemilih cerdas yang akan memberikan kontribusi besar sehingga dapat menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas.

Menurut Kartono (2009: 63), pendidikan politik (*political forming*) atau (*politische foarming*) merupakan membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik. Disebutkan bahwa "*forming*" merupakan makna yang mengandung arti membentuk dan

memunculkan individu-individu yang sadar politik, sadar status politik dan kedudukan politiknya di masyarakat umum, dan makna dari “*Building*” yaitu membangun dan pembentukan dari pendidikan politik itu sendiri. Dengan kata lain hal ini merupakan usaha atau upaya pembentukan-pembentukan individu yang dituntut untuk memiliki kesadaran akan pentingnya mengetahui dinamika politik dan memahami akan status dirinya serta kedudukan politik agar dapat menyikapi hal yang terjadi sekitar masyarakat.

2. Inti dan Tujuan Pendidikan Politik

Menurut Kartono (2009: 66), inti dari pendidikan politik ialah pemahaman aspek-aspek politik dari setiap permasalahan dan pemahan politik yang berarti pemahaman konflik.

Inti dari pendidikan politik adalah bagaimana masyarakat dapat sadar akan pentingnya kedudukan dan status dirinya serta memiliki fikiran dan tindakan-tindakan yang sesuai dengan permasalahan maupun fenomena politik, pendidikan politik juga merupakan sebuah mekanisme tahapan seseorang atau beberapa orang yang dapat dikelompokkan dan dapat pula saling mempengaruhi individu maupun kelompok lainnya agar memperoleh dan diperoleh pengetahuan serta wawasan yang lebih luas dan bersih yang disertai dengan keterampilan politik yang terarah, melakukan penyesuaian diri pribadi dan kondisi di lingkungan sekitarnya.

Menurut Kartono (2009: 69), diadakannya pendidikan politik tidak lain adalah untuk mempersiapkan kader-kader politik yang mampu berfungsi baik

di tengah perjuangan politik untuk mendapatkan penyelesaian politik yang bisa memuaskan semua pihak, sesuai dengan konsep-konsep politik yang sudah ditetapkan.

Pendidikan politik tidak hanya semata-mata berbicara kepada masyarakat luas sebagai objek kajian yang paling sesuai untuk memberikan pemahaman yang mendasar tentang dinamika maupun permasalahan serta bagaimana merespon dalam tindakan nyata saja, melainkan pendidikan politik juga sangat diperlukan untuk diberikan kepada kader-kader politik maupun calon-calon dari partai politik yang diusungkan partainya untuk menjadi anggota DPRD.

Kader-kader politik sangat memerlukan pendidikan politik untuk dijadikan sebagai bekal dan acuan dalam karakteristik di masa pimpinannya kelak, di dalam proses pemberian pendidikan politik diharapkan munculah kader-kader politik yang memiliki fikiran kritis dan demokratis, sehingga apabila dimunculkan suatu fenomena yang dianggap tidak wajar dari konstitusi maupun aturan cara main, mereka dapat melawan hal-hal tersebut. Tentu saja diharapkan dapat memperbaiki citra politik yang selama ini masyarakat selalu memandang politik dari segi negatifnya saja.

Tujuan dari pendidikan politik menurut Kartono (2009: 82) ialah :

- a. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat, rakyat dan seterusnya memahami situasi politik berani bersikap sanggup memperjuangkan kepentingan ideologi tertentu.

- b. Memperhatikan dan mengupayakan peranan insani, mengembangkan bakat dan kemampuan agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan inti diadakannya pendidikan politik ialah upaya yang bersifat mendidik dalam membentuk masyarakat di semua kalangan untuk menjadi masyarakat yang sadar politik yang berlandaskan asas dasar kenegaraan Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 agar didapatkannya masyarakat yang mengalami pembaharuan kehidupan politiknya, dan memunculkan pemilih cerdas.

Khusus untuk generasi muda, tujuan pendidikan politiknya pun tidak jauh berbeda yaitu untuk membentuk tunas bangsa atau generasi muda yang sadar politik, yang dimaksud sadar politik ialah sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang tentu saja tetap berlandaskan pada ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Selain itu juga diharapkan mampu membangun generasi muda menjadi generasi selanjutnya, generasi Indonesia secara utuh yang perwujudannya mengacu pada kepribadian Indonesia.

3. Pendidikan Politik Di Partai Politik

Pasal 31 UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berkewajiban memberikan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan status sosial mereka sebagai warga

negara, membentuk masyarakat turut andil dalam berpartisipasi dan membangun karakter bangsa yang lebih kritis.

Hal lebih lanjut dijelaskan kembali tentang kegiatan-kegiatan pendidikan politik yang terdapat didalam suatu partai politik. didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik di dalam pasal 6 menjelaskan bahwa fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik dapat diberikan di dalam kegiatan yang diantaranya :

- a. Seminar dan lokakarya.
- b. Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan.
- c. Asistensi, pelatihan dan bimbingan teknis.
- d. Pergelaran seni dan budaya.
- e. Jambore, perkemahan, nepak tilas.
- f. Berbagai macam perlombaan seperti pidato, jalan sehat, cerdas tangkas, karya tulis ilmiah, film dokumenter dan ciptaan lagu.

Terkait dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa kelompok sasaran fasilitas penyelenggaraan pendidikan politik meliputi :

- a. Partai politik.
- b. Partai politik lokal.
- c. Organisasi kemasyarakatan.

- d. Lembaga nirbala lainnya.
- e. Lembaga instansi vertikal daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat di analisis bahwa partai politik merupakan salah satu dari beberapa instansi yang memiliki kewenangan dalam memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Partai politik dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti loka karya, seminar, dan sosialisasi sebagai alat penghantar pendidikan politik ke masyarakat, didalam melakukan pendidikan politik hendaklah dilandasi oleh tujuan murni yang terkandung didalam pendidikan politik. Tujuan dari pendidikan politik itu sendiri adalah usaha partai politik dalam membangun kesadaran pola fikir masyarakat yang sadar politik dan mampu untuk menolak mobilisasi oleh beberapa kelompok kepentingan.

C. Tinjauan Tentang Perilaku Pemilih

1. Definisi Perilaku Pemilih

Menurut Firmansyah (Efriza, 2012: 480), secara garis besar, pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya. Kemenangan sebuah partai politik sangat bergantung kepada para peserta pemilihnya, dan berikut definisi perilaku pemilih menurut beberapa ahli.

Ketujuh domain kognitif dalam mendorong perilaku pemilih menurut Surbakti (2012: 480) ini ialah :

- a. Isu dan kebijakan politik.
- b. Citra sosial.
- c. Perasaan emosional.
- d. Citra kandidat.
- e. Peristiwa mutakhir.
- f. Peristiwa personal.
- g. Faktor-faktor epidemik.

Berikut adalah uraian tentang ketujuh domain kognitif pendorong pemilih dalam menentukan pilihannya.

Pertama, biasanya pemilih dalam menentukan pilihannya melihat dari aspek isu dan kebijakan politiknya, tidak sedikit para calon kandidat didalam proses kampanye menyerukan tentang kebijakan-kebijakan bahkan visi misi mereka di saat mereka akan memenangkan pemilihan umum tersebut, biasanya mereka melakukan dalam bentuk sosialisasi memperkenalkan diri di muka publik maupun menuliskan kebijakan atau visi misi mereka didalam spanduk sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui calon dan hal ini merupakan salah satu yang bisa dianggap berhasil dalam mencuri hati masyarakat terkhusus para pemilih.

Kedua, pemilih dapat memilih seorang calon dengan citra sosial para calon yang ada, tidak jarang calon yang memiliki karakteristik berbeda di mata sosial akan menang di dalam pemilihan umum, biasanya masyarakat akan cepat menghafal para calon-calon yang secara sosial sudah tidak familiar.

Ketiga, masyarakat atau pemilih bisa memilih seseorang calon kandidat hanya karena dirasakan mereka memiliki perasaan emosional terhadap calon tersebut, dan dimensi emosional yang terpancar dari kontestan yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan oleh kandidat tersebut.

Keempat, *personality* juga dapat membuat masyarakat tertarik dan memilihnya, sifat-sifat pribadi yang lebih santun dan tidak segan untuk bersosialisasi ke masyarakat walau hanya sekedar bertegur sapa dianggap sebagai sifat yang harus dimiliki oleh para pemimpin bangsa.

Kelima, sebelum diadakannya proses pemilihan umum, selama beberapa lama selalu ada kampanye terbuka yang dimaksudkan sebagai pengenalan kandidat ke masyarakat, hal-hal yang terjadi baik diluar kendali maupun tidak, sangat berdampak besar dalam mendorong warga untuk memilih, biasanya seorang calon kandidat yang memiliki peristiwa yang tidak terduga pada masa kampanye sebelum pemilu, dan apabila peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang negatif, maka besar kemungkinan simpati warga atau pemilih akan berkurang terhadap calon tersebut.

Keenam, para pemilih biasanya cenderung untuk memilih calon tertentu apabila terdapat peristiwa personal yang terjadi kepada peserta pemilihan umum. Ketujuh ialah epidemik, epidemik merupakan isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu minat seorang pemilih mengenai hal hal baru yang sedang terjadi pada saat itu.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Firmansyah (Efriza, 2012: 483), bahwa perilaku politik yaitu :

- a. Pemilih rasional.
- b. Pemilih kritis.
- c. Pemilih tradisional.
- d. Pemilih skeptis.

Berikut penjabaran yang peneliti coba jelaskan mengenai 4 tipe pemilih tersebut :

Pemilih Rasional (*rational choice / rational voter*) jenis pemilih rasional lebih melihat dari isu-isu kebijakan apa yang telah mereka perbuat, pemilih jenis ini lebih mengedepankan kemampuan partai politik melalui program-program kerja yang telah mereka buat. Tidak berhenti sampai disitu saja, setelah partai politik tersebut melaksanakan program-program kerjanya, pemilih jenis ini lalu menganalisa secara lebih mendetail terhadap realitanya, mereka juga membandingkan akan kredibilitas historis partai politik untuk dijadikan sebagai hasil pengamatan mereka.

Pemilih yang rasional akan terus mengawasi dan memberikan nilai yang dilakukan secara personal ke partai politik. Pemilih jenis ini tidak begitu mementingkan tentang ideologi apa yang dianut oleh partai politik, maupun nilai-nilai tradisional, budaya, agama, ras, dan unsur lainnya, pemilih ini lebih mengedepankan bukti nyata tentang apa saja yang telah partai politik itu perbuat dan apa dampak yang telah dirasakan oleh masyarakatnya.

Bahkan pemilih rasional tidak segan-segan apabila didalam masa sebelum pemilihan umum dilaksanakan terdapat peristiwa mutakhir yang menghasilkan sisi negatif akan berpaling dari partai politik atau calon kandidatnya.

Pemilih Kritis, pemilih ini bisa dikatakan pemilih yang selalu membandingkan, pemilih ini memadukan antara penyesuaian kemampuan partai politik dalam menuntaskan permasalahan yang sedang berlangsung dan kontribusi partai politik dengan ideologi yang telah mereka pilih. Pemilih jenis ini memiliki 2 tipe dalam membandingkan dan menentukan penilaian mereka, tipe pertama ialah pemilih yang menjadikan ideologi dasar partai politik, pemilih sebelumnya akan paham betul tentang ideologi

Tipe kedua dari sifat peneliti yang kritis ini adalah dengan menjadikan program kerja yang mereka buat sebagai acuan dasar dalam membandingkan ideologi yang mereka miliki, inti dasar dari pemilih yang kritis ini selalu menganalisis dengan cara membandingkan kedua hal tersebut yaitu faham ideologi dan realita program kerja yang telah mereka buat dan laksanakan. Pemilih kritis ini memiliki keinginan yang kuat dan memiliki kemampuan untuk terus memperbaiki kinerja para partai politik.

Pemilih Tradisional, jenis pemilih ini dapat dikatakan berbeda dengan 2 peneliti sebelumnya, pemilih tradisional tidak begitu mengutamakan kebijakan maupun program-program kerja baik yang ditawarkan maupun yang telah tampak terlihat dimasyarakat umum, pemilih ini juga tidak begitu mengutamakan nilai ideologi partai maupun calon kandidatnya dalam tolak

ukur mereka yang mendorong untuk memilih, pemilih ini lebih cenderung mengutamakan nilai-nilai, asal-usul partai politik, dan kedekatan kultur sosial budayanya. Mereka seakan tidak mau begitu merasa direpotkan dalam hal mengamati dinamika kegiatan politik para partai politik yang sedang berlangsung.

Pemilih jenis ini mengutamakan pada nilai historis dari partai politik maupun calon kandidat dan kepribadian pemimpin, salah satu karakteristik mendasar dari pemilih tradisional ini biasanya memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga besar kemungkinan ada beberapa orang maupun kelompok yang dapat medoktrin dan memobilisasikan pemilih tradisional ini. Menurut pemilih jenis ini, hal apa saja yang dikeluarkan oleh pemimpin tanpa perlu ada yang dikaji ulang maupun di filter mereka menganggapnya itu adalah sebuah keharusan perintah yang kebenarannya sudah tidak perlu di uji lagi.

Pemilih tradisional di negara Indonesia ini masih mendominasi di urutan teratas, namun semakin kesini kesadaran masyarakat di tipe pemilih tradisional sudah tampak terlihat meningkat, hal ini didukung oleh banyak pemimpin-pemimpin yang saat ini menjabat di sektor pemerintahan terus melakukan penyimpangan-penyimpangan dan menyalahgunakan wewenangnya, hal inilah yang membuat pemilih tradisional lebih bisa untuk di ajak berfikir lebih rasional. Adapun pemilih tradisional di Indonesia ini masih jelas terlihat sangat rentan di mobilisasikan, namun dalam mobilisasi

terjadi transaksi adanya timbal balik berupa imbalan dari para partai politik ke pemilih tradisional ini.

Pemilih skeptis, merupakan pemilih yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali terhadap suatu proses politik dan pemilihan umum yang sedang berlangsung, mereka sama sekali tidak berorientasi kepada ideologi, kebijakan, program-program kerja yang telah terealisasi atau masih bersifat rancangan, visi dan misi, serta hubungan nilai-nilai, budaya dan relasi historis terhadap partai politik maupun calon kandidat yang sedang diusungkan.

Tidak adanya keinginan bagi pemilih skeptis ini dalam melakukan pengawasan maupun sekedar faham akan apa yang sedang terjadi dan bagaimana hasil yang akan terjadi dalam pemilihan pemimpin untuk masa yang akan kedepannya. Pemilih jenis ini biasanya menyebutkan diri mereka sebagai Golongan Putih (Golput) karena sebagian dari mereka menganggap bahwa siapapun yang akan menduduki jabatan pemerintahan tidak akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan kehidupan mereka. Walaupun mereka menggunakan hak suara pilihnya, biasanya mereka pada saat memilih didasari atas dasar tebak pilih.

Beban pemerintah dan partai politik selaku peserta dalam pemilihan umum untuk membenahi dan mengajak masyarakat agar dapat memberikan kontribusinya selaku warga dalam mengikuti pemilihan umum dan memilih calon partai maupun secara profesional dan rasional tanpa adanya pengaruh dari orang lain, karena apabila semakin lama jumlah masyarakat golput

semakin bertambah, tentu saja akan merusak sistem negara yang selama ini mengakui menggunakan sistem demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada pada rakyat.

D. Kerangka Pikir

Penelitian tentang Fungsi Pendidikan Partai Keadlian Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum 2014 ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi PKS dalam melakukan pendidikan politik di masyarakat. Unsur dari pendidikan politik yang meliputi pengenalan, pemahaman, berfikir secara kritis, menentukan dan merubah sikap, serta melakukan perubahan nyata.

Kurangnya pemahaman masyarakat khususnya di Kota Metro terhadap pentingnya memilih, sikap jenuh dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap calon-calon peserta pemilu dan masih ada masyarakat yang memilih dilatarbelakangi oleh desakan kelompok-kelompok tertentu Dengan unsur-unsur pendidikan politik tersebut PKS dapat melakukan pendidikan politik, salah satu bukti yang telah dilakukan oleh PKS dalam melakukan pendidikan politik adalah dengan memberikan simulasi cara pencoblosan surat suara yang benar ke masyarakat sehingga terciptanya masyarakat yang sadar politik dan paham atas kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan hak suaranya, sehingga dapat di gambarkan bagan kerangka pikir sebagai berikut :

